



# Ciptakan Pemerintahan yang Bersih, Pemkot Bentuk Satgas Pencegahan Korupsi

## Probolinggo, Bhirawa

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin selalu punya gebrakan dalam memimpin wilayahnya. Terbaru, ia mengeluarkan surat keputusan tentang satuan tugas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Kebijakan ini adalah inisiatif Habib Hadi. Wali kota bertandang ke KPK RI di Jakarta dan ditemui Pimpinan KPK Alexander Marwata terkait kebijakan itu.

Pimpinan KPK pun mengapresiasi inisiatif yang dimiliki Wali Kota Habib Hadi. Pasalnya, jarang kepala daerah punya komitmen seperti ini.

“Mudah-mudahan komitmen dan langkah ini dapat menjadi tonggak pencegahan korupsi yang lebih serius dan implementatif di tiap Perangkat Daerah sehingga secara keseluruhan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Pemerintahan Kota Probolinggo yang bersih serta bebas dari korupsi,” tulis Habib Hadi dalam akun instagramnya @handaledukasi, Selasa (21/2).

Di dalam SK Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/54/KEP/425.012/2023 dijelaskan ada satgas tingkat kota yang dimotori Ins-

pektorat. Dan, satgas tingkat perangkat daerah yang diketuai masing-masing kepala PD dan beberapa jajarannya.

Inspektur Kota Probolinggo Yusron Sumartono, Rabu (22/2) mengungkapkan, Wali Kota Habib Hadi ingin tata kelola pemerintahan Kota Probolinggo yang bersih, dilaksanakan dengan baik, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi.

“Selama ini Pak Wali (Habib Hadi) mengajari seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan olehnya semua sesuai aturan. Sepanjang ada aturan yang mendasari, Pak Wali tidak pernah melakukan langkah tanpa dasar yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau negara,” jelasnya.

Harapannya, lanjut Yusron, seluruh perangkat daerah juga melakukan yang dilakukan kepala daerah. Untuk itu, diben-



Habib Hadi bersama pimpinan KPK Alexander Marwata.

tuklah satgas pencegahan korupsi di masing-masing PD. Tim tersebut membantu memonitor pelaksanaan tugas yang menjadi

tanggung jawab dan kewenangan PD.

“Kalau Pak Wali terbatas lingkupnya untuk memantau selu-

ruhnya. Upaya ini dalam rangka pencegahan korupsi di PD, maka dibentuklah satgas dan sudah di-SK kan siapa-siapa saja pe-

tugasnya,” imbuh Plt Kepala BPPKAD ini.

Selanjutnya, satgas yang dibentuk untuk mencegah PD melakukan tindakan di luar ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah ini akan diluncurkan perkiraan pekan kedua bulan Maret mendatang.

Peluncuran satgas bakal dibarengi pembekalan dari tim KPK, BPK dan BPKP. Masih menurut Yusron, tiga unsur ini yang punya tugas dan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Secara teknis akan dijelaskan dalam pembekalan bagaimana upaya pencegahan di masing-masing PD.

Salah satunya, teknik fraud control plan (pencegahan pengendalian kecurangan). “Dengan komitmen Pak Wali, harapan kita bersama, seluruh PD menyambut positif dengan upaya dan tindakan nyata. Tidak hanya formalitas saja, dalam pertanggung jawaban APBD, pengelolaan anggaran diwujudkan secara nyata. Kita berkomitmen bersama mencegah korupsi. Jangan sampai di pimpinan saja, di jajaran PD, bersama-sama kita cegah korupsi,” tambah Yusron. [wap.dre]

wiwit agus pribadi/bhirawa